

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRODUSEN ATAS TINDAKAN
WANPRESTASI DISTRIBUTOR DALAM PERJANJIAN
(Studi di CV.Linggar Sentosa Kabupaten Gresik)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**NANANG LISTIONO
115010100111011**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRODUSEN ATAS TINDAKAN WANPRESTASI

DISTRIBUTOR DALAM PERJANJIAN

(Studi di CV.Linggar Sentosa Kabupaten Gresik)

NANANG LISTIONO

115010100111011

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 9 Oktober 2018

dan disahkan pada tanggal 24 Oktober 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Moch. Zairul Alam S.H., M.H
NIP. 197409092006041002

Ranitya Ganindha S.H., M.H
NIP.198806302014042001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si
NIP. 19620805 198802 1 001

Dr. Budi Santoso, S.H. LLM
NIP.197206222005011002

IDENTITAS TIM PENGUJI

MAJELIS 1



Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD
NIP. 196611121989032001

Pendidikan :

- Universitas Brawijaya
Sarjana Ilmu Hukum, graduated in 1988
- The Washington College of Law, American University
Master Degree of International Trade and Banking, lulus tahun 1993
- University of Sydney
Doctorate of Intellectual Property Law, lulus tahun 2002

MAJELIS 2



M. Zairul Alam, S.H., M.H.
NIP. 197409092006041002

Pendidikan :

- Universitas Brawijaya
Sarjana Ilmu Hukum, Lulus tahun 1997
- Universitas Indonesia
Magister Ilmu Hukum, Lulus tahun 2012

MAJELIS 3



Ranitya Ganindha, S.H., M.H.
NIP. 198806302014042001

Pendidikan :

- Universitas Brawijaya
Sarjana Ilmu Hukum, Lulus tahun 2010
- Universitas Airlangga
- Magister Ilmu Hukum, Lulus tahun 2012

MAJELIS 3



Fitri Hidayat, S.H., M.H.
NIK. 0007078502

Pendidikan :

- Universitas Brawijaya
Sarjana Ilmu Hukum, Lulus tahun 2007
- Universitas Brawijaya
Magister Ilmu Hukum, Lulus tahun 2011

KATA PENGANTAR

Segala puji peneliti panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga peneliti dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih peneliti sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH.,Msi selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso,SH.LLM selaku Ketua Bagian Hukum perdata.
3. Bapak M. Zairul Alam, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Utama, terimakasih atas bimbingan, nasihat serta kesabarannya.
4. Ibu Ranitya Ganindha, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan kesabarannya.
5. Keluarga besar CR1 yang sudah memberikan semangat kepada penulis.
6. Kepada seluruh konsumen CR1 terutama di Kota Malang atas segala dukungan dan lelucon yang diberikan kepada penulis.
7. Orang Tua saya yang selalu memberikan banyak dukungan, motivasi, dan doanya untuk kelancaran selama kuliah berlangsung hingga skripsi, dan ibu tak pernah lelah mendoakan saya dan hal itulah yang membuat saya semangat dalam penyusunan dan menyelesaikan skripsi ini, kakak saya untuk dukungan dan doanya.
8. Kepada Sellysia Linda dan teman-teman saya yang selalu memberikan motivasi, dukungan, motivasi dan kesabarannya hingga saat ini menantikan saya lulus.

Peneliti yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu peneliti harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata peneliti mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini peneliti melakukan kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 24 Oktober 2018

Nanang Listiono



DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Pernyataan Keaslian Skripsi	ii
Kata Pengantar	iii
Ringkasan	iv
<i>Summary</i>	v
Daftar isi	vi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penulisan	9
D. Manfaat Penulisan	9
E. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Efektifitas	12
B. Kajian Umum Tentang Perlindungan Hukum	16
C. Kajian Umum Tentang Kepastian Hukum	23
D. Kajian Umum Tentang Perjanjian	25
E. Kajian Umum Tentang Asas-Asas Dalam Perjanjian.....	27
F. Kajian Umum Tentang Distributor dan Produsen	29
G. Pengertian Wanprestasi	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian.....	34
B. Pendekatan penelitian	34
C. Alasan pemilihan lokasi penelitian.....	35
D. Jenis dan sumber data	35
E. Teknik memperoleh data	36
F. Populasi sampel dan teknik sampling.....	36
G. Teknik analisis data	37
H. Definisi operasional	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
B. Perlindungan Hukum Bagi Produsen Kopi CR 1 Dalam Perjanjian Kerjasama Dengan Distributor Yang Melakukan Wanprestasi Sesuai Pasal 1234 KUHPerdara.....	41

- C. Hambatan dan upaya yang dilakukan terkait perlindungan bagi produsen kopi cr1 dalam perjanjian kerjasama dengan distributor yang melakukan wanprestasi. 58

BAB V PENUTUP

- A. KESIMPULAN 64
B. SARAN..... 65

DAFTAR PUSTAKA 67

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam era yang sangat maju ini baik teknologi maupun perekonomiannya yang membuat berkembangnya suatu negara untuk berlomba-lomba mencapai puncak teratas peradaban, hal tersebut mempengaruhi seseorang untuk berusaha mengikutinya. Khususnya dalam dunia bisnis atau bidang ekonomi yang merupakan hal mendasar dalam kehidupan manusia, saat semua orang menginginkan hidupnya lebih sejahtera maka hal yang pertama kali dipenuhi adalah memiliki uang yang lebih untuk kelangsungan setiap kehidupannya, karena hal tersebut mendorong seseorang melakukan berbagai cara agar dapat mencapainya. Salah satu bentuk cabang suatu perjanjian yang dijadikan sebagai cara awal seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, maka tidak lain adalah perjanjian kerjasama dalam suatu kegiatan ekonomi.

Definisi perjanjian sendiri telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeenkomst* dalam bahasa Belanda. Kata *overeenkomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan. Perjanjian merupakan terjemahan dari *vervinten* sedangkan persetujuan merupakan terjemahan dari

oveereenkomst.¹ Sedangkan Kerjasama merupakan suatu pengikatan dua orang atau lebih dan atau badan hukum terhadap suatu perjanjian tertentu sesuai yang telah disepakati.

Perjanjian kerjasama merupakan salah satu bentuk perjanjian dasar yang timbul dalam ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disingkat KUHPerdata perlu juga tunduk pada Asas-Asas dan ketentuan hukum yang terdapat dalam KUH Perdata.² Menurut R Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Perjanjian kerjasama merupakan perikatan antara dua belah pihak atau lebih dimana perjanjian tersebut menggunakan barang atau obyek benda sebagai obyek dari perjanjian. Seperti halnya perjanjian kerjasama antara produsen dengan distributor. Perjanjian kerjasama produsen dengan distributor merupakan bentuk perjanjian khusus, namun tetap berdasarkan perjanjian secara umum yang sudah diatur dalam KUHPerdata. Suatu perjanjian kerjasama tentu memiliki ketentuan-ketentuan yang mengikat para pihak yakni baik produsen maupun distributor yang tertuang dalam suatu perjanjian dibawah tangan maupun secara otentik oleh Notaris.

Dalam ketentuan-ketentuan tersebut tentunya mempunyai suatu kesepakatan yang mengikat para pihak seperti halnya perjanjian kerjasama

¹ R Setiawan, **Pokok Pokok Hukum Perikatan**, Putra Abardin, Bandung, 1999. hlm.1.

² Arini Faradinna, jurnal. **Perbandingan Kegiatan Sewa Guna Usaha Dan Pembiayaan Konsumen (Analisis Contoh Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Di Pt.Bca Finance Dikaitkan Dengan Pengaturan Mengenai Jaminan Fidusia)**, skripsi, fakultas hukum universitas Indonesia, Jakarta 2013

yang dilakukan oleh CV. Linggar Sentosa dengan pihak distributor yang diketahui bernama Unyil Coffe. CV. Linggar Sentosa ini bergelut pada bidang makanan dan minuman. Yang menjadi andalannya yakni kopi bubuk yang dikenal dengan CR1. Pengiriman kopi CR1 ini tidak hanya dalam Kabupaten Gresik saja tetapi kota-kota sekitarnya menjadi pelanggan kopi CR1 ini, salah satunya Kota Malang. Menurut perjanjian nomor 02/SPK-CV.LS/05/15 telah diketahui bahwa CV. Linggar Sentosa berperan sebagai pihak produsen dan Unyil Coffe berperan sebagai distributor. kedua pihak tersebut mengadakan suatu perjanjian kerjasama dimana para pihak melakukan kerjasama yakni CV. Linggar Sentosa yang berperan sebagai pihak produsen mengolah kopi bubuk Merek CR.1 yang akan dipasarkan atau dijual dalam kerjasama dengan Unyil Coffe.

Dengan seiring berjalannya waktu pihak kedua diketahui oleh pihak pertama melakukan kecurangan didalam penyajian resep kopinya dimana diketahui pihak kedua mengubah takaran dari komposisi kopi merek CR.1. hal tersebut tidak dibenarkan karena akan berpengaruh pada cita rasa kopi merek CR.1 tersebut. Pihak pertama merasa dirugikan oleh tindakan yang dilakukan oleh pihak kedua, karena dengan merek produk yang sama namun rasanya berbeda.

Dalam perdagangan barang atau jasa, merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Merek memiliki nilai yang strategis dan penting baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen, merek selain untuk

membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran. Bagi konsumen, merek selain mempermudah pengidentifikasian juga menjadi simbol harga diri. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu, cenderung untuk menggunakan barang dengan merek tersebut seterusnya dengan berbagai alasan seperti karena sudah mengenal lama, terpercaya kualitas produknya, dan lain – lain sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata.³ Mengingat merek mempunyai peran yang sangat penting dalam perdagangan barang atau jasa, pengaturan tentang merek dalam sistem hukum Indonesia sudah berlangsung lama dibandingkan dengan jenis-jenis HKI.

Masyarakat Indonesia memiliki Kecenderungan terhadap pemakaian produk-produk yang lebih dikenal masyarakat, tetapi daya beli masyarakat yang memilih barang dan jasa yang bernilai ekonomis walaupun mereka menyadari bahwa barang dan jasa tersebut merupakan palsu dan kualitasnya tidak sebaik yang asli. Hal ini menyebabkan peluang bagi para pengusaha yang mempunyai itikad tidak baik untuk membuat barang atau jasa dengan menggunakan merek terkenal dan dimodifikasi sendiri serta mendaftarkan sebagai merek produk pengusaha tersebut. Hal tersebut menyebabkan kerugian bagi pemilik dari merek yang terkenal karena hak kekayaan intelektualnya dilanggar dan secara langsung menurunkan omset penjualan.sama halnya dengan Tindakan yang

³ Muhamad Djumhana, **Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.78

diketahui dari konsumen kopi CR1 mengeluhkan karena rasa dari kopi CR1 berbeda dari sebelumnya. Hal ini merupakan tindakan yang dapat merugikan bagi Industri Kopi CR1 dan dapat menurunkan omset Industrinya.

Berdasarkan hal tersebut maka pihak unyil coffee dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian pihak lain yakni pihak CV. Linggar Sentosa. Wanprestasi merupakan ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Wujud dari wanprestasi tersebut bermacam-macam diantaranya adalah sebagai berikut :⁴

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Perbuatan wanprestasi ini merupakan suatu perbuatan yang telah jelas dilarang oleh undang-undang yakni **Pasal 1238 KUHPerdara** yang berbunyi

“si berutang adalah lalai , apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akata sejenis itu telah dinyatakan lalai , atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan .”

⁴ R.Subekti, **Hukum Perjanjian** Cet.ke-II,Jakarta: Pembimbing Masa, 1970, hlm 50

Wanprestasi atau cidera janji merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum karena melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang baik undang-undang perdata maupun pidana. Kerugian yang didapatkan oleh pihak CV. Linggar Sentosa sendiri diperkirakan hingga jutaan rupiah karena hal tersebut maka CV. Linggar Sentosa sebagai produsen berdasarkan pasal 1243 KUHPerdata mempunyai hak-hak untuk mengganti kerugiannya sebagai bentuk perlindungan hukum. CV. Linggar Sentosa sebagai pihak produsen memiliki hak-hak yang dibenarkan oleh undang-undang. Namun secara hukum pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum bagi produsen terhadap distributor yang melakukan wanprestasi belum ada, hanya ada ketentuan secara umum yang terdapat dalam pasal 1234 KUHPerdata yang menjadi dasar pemenuhan atas kerugian pihak produsen. Bunyi pasal 1234 KUHPerdata yakni sebagai berikut:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan. Apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya. Atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak distributor juga termuat dalam ketentuan Perjanjian Kerjasama antara pihak produsen dan distributor pada pasal 15 ayat 1 yang berbunyi:

“setelah pihak kedua dapat menerima barang produksi pihak pertama, maka pihak kedua tidak dibenarkan untuk merubah atau menambah bubuk kopi merek lain kedalam kemasan kopi merek cr.1”

Berdasarkan hal tersebut, perlunya upaya-upaya dan cara-cara agar hak-hak produsen sebagai pihak yang dirugikan dapat dipenuhi baik secara materiil maupun immateriil.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas , maka penulis tertarik mengangkat ke dalam penelitian dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRODUSEN ATAS TINDAKAN WANPRESTASI DISTRIBUTOR DALAM PERJANJIAN** (Studi di CV.Linggar Sentosa Kabupaten Gresik)”

Tabel 1
Bagan Orisinalitas

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Orisinalitas
1.	2016	Arum Dewi Azizah Salsabila, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya	Pelaksanaan perlindungan hukum bagi lessor ketika lesse wanprestasi dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor (studi kasus di pt.toyota astra financial services kota malang)	1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi lessor ketika lesse wanprestasi dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor di pt.toyota astra financial services kota malang? 2. Apa hambatan-hambatan perlindungan hukum bagi lessor ketika lesse wanprestasi dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor	Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pokok pembahasan pada skripsi penulis membahas subyek hukum yakni produsen dan distributor. Sedangkan pada penelitian sebelumnya subyek hukumnya adalah lesse dan lessor.

				(studi kasus di pt.toyota astra financial services kota malang)	
2	2013	Lalu danu hariyatma Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas mataram	Tinjauan Yuridis perjanjian leasing dan akibat hukum dalam terjadinya wanprestasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan perjanjian leasing berkaitan dengan operating lesse cabang mataram 2. Bagaimana akibat hukum yang timbul jika terjadi wanprestasi dlam perjanjian operating lesse 	Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pokok pembahasan pada skripsi penulis membahas subyek hukum yakni produsen dan distributor. Sedangkan pada penelitian sebelumnya subyek hukumnya adalah lesse dan lessor.

3	2016	Nurfajryanti Ramadhani Fakultas syariah dan hukum uin alaudin makassar	perlindungan konsumen terhadap wanprestasi pelaku usaha	1. Bagaimanakah aturan hukum tentang penyelesaian sengketa konsumen? 2. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen?	Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pokok pembahasan pada skripsi penulis membahas subyek hukum yakni produsen dan distributor. Sedangkan pada penelitian sebelumnya subyek hukumnya adalah konsumen dengan pelaku usaha.
---	------	--	---	--	--

Sumber : *Website Online, diolah 2018*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi produsen kopi CR1 dalam perjanjian kerjasama dengan distributor yang melakukan wanprestasi sesuai pasal 1234 KUHPdata ?
2. Apa hambatan dan upaya perlindungan bagi produsen kopi CR1 dalam perjanjian kerjasama dengan distributor yang melakukan wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perlindungan hukum bagi produsen kopi CR1 dalam perjanjian kerjasama dengan distributor yang melakukan wanprestasi sesuai pasal 1234 KUHPerdara
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Apa hambatan dan upaya dalam perlindungan hukum bagi produsen kopi CR1 dalam perjanjian kerjasama dengan distributor yang melakukan wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu:

1. Penelitian ini di harapkan memberikan manfaat secara teoritis dalam perkembangan. ilmu hukum berupa:
 - a. Memberikan masukan bagi para teorisi atau bagi orang yang ingin memperdalam dan mengembangkan atau menambah wawasan pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai hukum perdata buku iii kuhperdata tentang perjanjian
 - b. Memberikan masukan pengetahuan baru yang bersifat edukatif. Dengan memberikan gambaran yang lebih baik mengenai sistem hukum serta merupakan alat bantu bagi disiplin-disiplin ilmu lain .
 - c. merupakan instrumen untuk menentukan perkembangan hukum
 - d. memberikan masukan bagi perkembangan asas-asas umum hukum dan membantu dalam sumbangan bagi doktrin
 - e. Memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum perdata bisnis.

2. Manfaat Praktis ditujukan kepada beberapa pihak yakni sebagai berikut:

- a. Bagi pembuat kebijakan diharapkan menambah wawasan baru dalam penentuan sebuah kebijakan khususnya di dunia usaha bisnis.
- b. Bagi dunia usaha atau industri menjadi salah satu rujukan dalam proses pembuatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
- c. Bagi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penelitian diharapkan menjadi wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang bisnis.

E. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dalam mempelajari proposal ini, maka dalam bagian ini akan diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan proposal. Berikut ini akan dikemukakan sistematika penulisan dalam :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I dalam penulisan skripsi ini, adalah berisi tentang latar belakang, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dari adanya penelitian dan manfaat penelitian ini kedepannya.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab II ini berisi kajian umum yang di dalamnya terdapat sub pokok bahasan yang mengkaji, membahas dan memuat argumentasi ilmiah, teori atau doktrin mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap produsen.

BAB III: METODE PENELITIAN

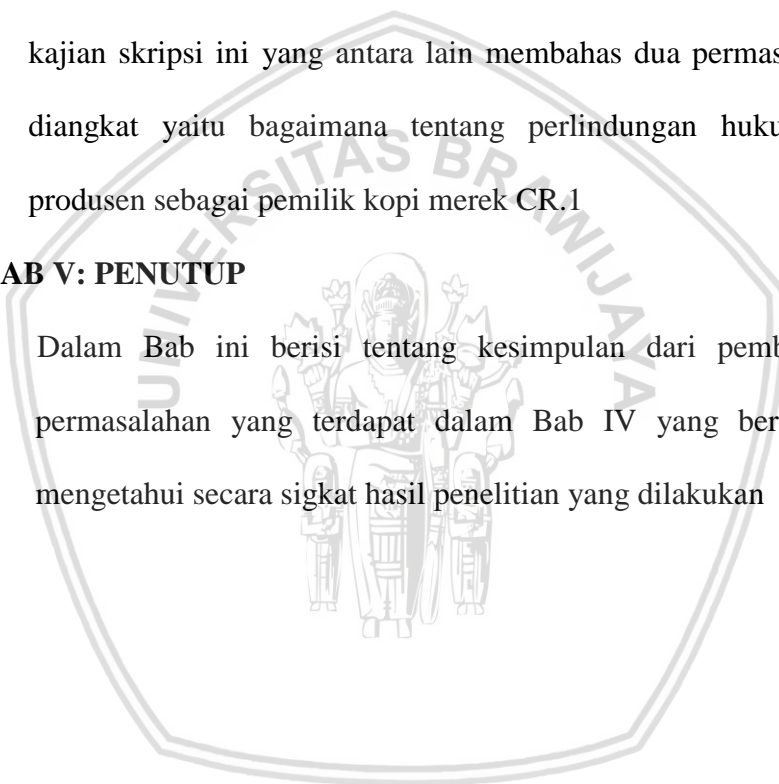
Bab III ini berisi mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan definisi operasional.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab IV dalam penulisan skripsi ini berisi pembahasan terhadap fokus kajian skripsi ini yang antara lain membahas dua permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana tentang perlindungan hukum terhadap produsen sebagai pemilik kopi merek CR.1

BAB V: PENUTUP

Dalam Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dua permasalahan yang terdapat dalam Bab IV yang bertujuan untuk mengetahui secara sigkat hasil penelitian yang dilakukan



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Efektifitas

Mengenai efektifitas hukum tidak terlepas dari mengkaji mengenai ketaatan manusia terhadap hukum yang berlaku. Jika suatu aturan hukum tersebut ditaati, maka bisa dikatakan bahwa hukum tersebut telah efektif. Namun tetap dipertanyakan lebih jauh mengenai derajat keefektifitasannya. Sehingga berbicara mengenai efektif atau tidaknya hukum tersebut dapat dilihat dari besarnya masyarakat yang mentaati hukum tersebut dan tergantung dari kepentingannya sendiri. Jika masyarakat mentaati hukum karena kepentingan *Compliance* (taat karena sanksi), dan atau *Identification* (taat karena menjaga hubungan baik), maka dapat dikatakan bahwa derajat ketaatannya sangat rendah dan dapat disimpulkan bahwa suatu aturan hukum tersebut tidak efektif dimata masyarakat.

Ada dua hal yang dapat dikaji dalam efektifitas hukum :

1. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya;
2. Bagaimana ketaatan terhadap suatu peraturan tertentu dan faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas hukum dan perundang-undangan adalah professional dan optimalisasi pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepada mereka maupun dalam menegakkan hukum dan

undang-undang. Bekerjanya undang-undang dapat dilihat dari dua perspektif, antara lain :

- a. Perspektif Organisatoris yang memandang undang-undang sebagai institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya. Didalam perspektif ini tidak terlalu memperhatikan pribadi yang pergaulan hidupnya diatur oleh hukum atau perundang-undangan.
- b. Perspektif Individu Ketaatan, yang lebih berfokus pada segi individu atau pribadi dimana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan. Fokus perspektif Individu adalah kepada masyarakat sebagai kumpulan pribadi-pribadi. Faktor kepentingan yang menyebabkan orang taat atau tidak taat terhadap undang-undang, dengan kata lain pola-pola perilaku masyarakat yang banyak mempengaruhi efektifitas perundang-undangan.¹

Efektifitas hukum mempunyai hubungan yang erat dengan usaha yang dilakukan yaitu hukum yang benar-benar dilakukan dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara sosiologis. Guna mewujudkannya hukum tersebut sangat tergantung pada usaha dalam menanamkan ketentuan hukum itu sendiri. Penegakan hukum itu tidak akan terjadi apabila tidak terdapat keseimbangan antara struktur, kultur, dan substansi terkait. Tindakan

¹ Mulyana Kusumah,., **Perspektif, Teori, dan Kebijakan Hukum**, 1986 Jakarta Rajawali Hlm 27

hukum biasanya mempunyai pengaruh tertentu apabila berkaitan dengan dengan tingkah laku dengan pihak lain yang berkepentingan. Suatu tujuan dapat terwujud dan efektif apabila telah sesuai dengan yang diinginkan dengan tercapainya tujuan tersebut. Adanya toleransi sosial terhadap penyimpangan hukum, antisipasi terhadap penegakan hukum dan kekebalan institusional pada dasarnya dapat menyebabkan berkurangnya efektifitas pemberlakuan suatu peraturan.

Hans Kelsen mengajukan teori melalui efektifitas hukum yang disebut “*principle of effectiveness*” yang menyatakan orang harus berperilaku harus menurut kaidah hukum. Apabila seseorang itu menilai berhasil apa tidak hukum berlaku efektif sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan, maka hal tersebut bisa diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tidak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan atau tidak.² Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa efektifitas hukum dipengaruhi perilaku warga masyarakat dalam mewujudkan hukum secara nyata sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki.

Dengan kata lain, efektif atau tidaknya hukum terletak pada keberhasilan dalam mewujudkan hukum di masyarakat sebagai sebuah perilaku yang sesuai dengan hukum. Hans Kelsen mengemukakan teori mengenai efektifitas hukum yakni “*principle of effectiveness*” dimana teori menurut Hans Kelsen ini menjelaskan adanya perilaku sesuai dengan aturan atau kaidah hukum yang ada

² Soerjono Soekanto, **Efektifitas peranan Hukum dan Sanksi**, Bandung, , Remaja Karya, 1985 Hlm 87

sehingga tujuan dari hukum dapat terpenuhi.³ Ahli hukum lain yang mengemukakan mengenai efektifitas hukum adalah Soerjono Soekamto dan Lawrence Friedman. Menurut Soerjono Soekamto dimana mengemukakan bahwa efektifitas dapat ditinjau dari 5 (lima) unsur yakni :⁴

1. Faktor hukum, yang memandang bahwa efektifitas dapat ditinjau dari hukum yang berlaku dimana dalam hukum tersebut memuat tujuan-tujuan hukum. tujuan hukum yang menjadi tolak ukur bagi suatu efektifitas hukum yang berlaku.
2. Faktor Penegak Hukum, yang dimaksud penegak hukum adalah pelaksana dalam suatu lembaga yang diaksud oleh hukum dimana memiliki kewenangan dan tugas.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas, sarana dan prasarana bertujuan untuk menunjang suatu hukum dan pelaksanaan dari hukum. cara untuk meningkatkan sarana adalah Jika sarana tidak ada maka dapat memberikan sarana, Jika sarana yang telah disediakan mengalami kerusakan maka akan dilakukan suatu perbaikan, Jika sarana telah ada namun memiliki kekurangan maka akan ditambahkan suatu sarana yang menunjang.
4. Faktor Masyarakat, masyarakat memiliki peranan penting dalam penentuan efektifitas dari hukum dimana hukum mengatur tingkah

³ Ibid

⁴ Ishaq, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum (cetakan ketiga)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 194

laku masyarakat agar tercipta kedamaian, kerukunan yang mendasari keefektifan suatu hukum yang berlaku.

5. Faktor Budaya, budaya yang dimaksud adalah budaya hukum di masyarakat apakah hukum tersebut menyalahi ataupun sesuai dengan budaya hukum di masyarakat.

Sedangkan menurut Lawrence Friedman efektifitas hukum dibagi menjadi 3 (tiga) unsur, yakni:

1. Substansi, mengacu pada hukum yang berlaku yakni Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dimana dalam hukum tersebut memuat tujuan hukum yang harus dipenuhi.
2. Struktur, yang dimaksud dengan struktur yakni pelaksana hukum atau peraturan perundang-undangan yang bertujuan dalam penentuan keefektifan suatu hukum.
3. Kultur, yang dimaksud dengan kultur yakni budaya hukum yang berlaku dimasyarakat.

B. Kajian Umum tentang Perlindungan Hukum

Hukum merupakan himpunan petunjuk dalam kehidupan, adanya suatu perintah serta larangan yang harus dipahami, ditaati oleh seluruh masyarakat, yang dapat mempunyai sanksi bagi pelanggar perintah atau larangan tersebut.⁵ Menurut Van Vollenhoven yang dimaksud dengan hukum adalah terjadinya suatu pergaulan hidup yang secara terus menerus berbenturan dengan gejala

⁵ Sri Harini Dwiyatmi, **Pengantar Hukum Indonesia**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm 8.

yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri.⁶ Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum” dimana Indonesia menganut atau tunduk pada hukum tertulis. Hukum juga merupakan suatu kaidah atau kumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.⁷ Secara keseluruhan pemikiran mengenai hukum memiliki kesamaan, diantaranya :⁸

- a. Merupakan suatu himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis
- b. Terdapat norma –norma didalamnya baik suatu perintah maupun larangan
- c. Mempunyai tujuan untuk mengatur pola tingkah laku dalam bermasyarakat
- d. Terdapat sanksi yang menjerat pelanggarnya

Adanya hukum yang mengatur di Negara memiliki tujuan, yakni memberikan kepastian, memberikan keadilan, serta memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Terdapat 2 (dua) teori yang mengatur mengenai tujuan hukum, yakni:

1. Teori Etis

Teori Etis dikemukakan oleh Aristoteles yang termuat dalam karyanya yang berjudul *Rhetorica dan Eticha Nicomachea* yang berpendapat bahwa tujuan

⁶ Ibid.,

⁷ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 40.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, **Perbuatan Melanggar Hukum**, dikutip dari Abdul Rachmad Budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm 5.

hukum semata-mata untuk mewujudkan suatu keadilan.⁹ Teori ini berpandangan bahwa hukum harus dapat membedakan mana yang adil dan mana yang tidak adil.

2. Teori Utilitas

Teori ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham dimana berpandangan bahwa tujuan dari adanya sebuah hukum untuk mewujudkan faedah atau efektif. Salah satu tujuan adanya hukum untuk memberikan perlindungan dengan cara melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan secara terukur yang disebut dengan hak. Kekuasaan tertentu di masyarakat menjadi alasan melekatnya hak pada seseorang.¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan mengenai pengertian dari perlindungan dimana hukum merupakan suatu perbuatan atau tindakan untuk melindungi, atau tempat berlindung. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya dalam hal perlindungan kepada subyek hukum baik secara represif maupun secara prefentif untuk melaksanakan fungsi hukum dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Terdapat beberapa pengertian dari perlindungan hukum menurut para ahli, diantaranya:

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

⁹ Rahman Syamsudin dan Ismail Aris, **Merajut Hukum Indonesia**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm 23.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum Cetakan Keenam**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 53.

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹¹ Terdapat beberapa pengertian perlindungan hukum menurut para ahli, diantaranya:

1. Satjipto Raharjo, yakni yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²
2. Philipus M. Hudjon, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹³
3. CST Kansil, berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁴
4. Muktie. A. Fadjar berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal

¹¹ Setiono, **Rule of Law (Supremasi Hukum)**, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3

¹² <http://tesishukum.com>, diakses pada tanggal 2 Mei 2018 pukul 10.00 WIB

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak untuk melakukan sesuatu sebagai subyek hukum.¹⁵

perlindungan dalam bahasa Inggris adalah protection, yang berarti sebagai:

- a. *aprotecting or being protected*
- b. *system protecting*
- c. *person or thing that protect.*

Bentuk kata kerjanya, protect(vt), artinya keep safe dan guard . Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai :

- a. tempat berlindung
- b. perbuatan atau hal dan sebagainya melindungi

Dari kedua definisi tersebut secara kebahasaan terdapat makna kemiripan unsur-unsur dari makna perlindungan, yaitu:

- a. Unsur tindakan melindungi
- b. Unsur adanya pihak-pihak yang melindungi
- c. Unsur cara melindungi

Berdasarkan unsur-unsur di atas, berarti kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlindungan terhadap konsumen dapat dilakukan melalui berbagai bentuk diantaranya perlindungan

¹⁵ Ibid.

ekonomi, sosial, politik dan perlindungan hukum. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap konsumen tersebut yang terpenting adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum, sebab hukum dapat mengakomodir berbagai kepentingan konsumen, selain itu hukum memiliki daya paksa sehingga bersifat permanen karena sifatnya yang konstitusional yang diakui dan ditaati keberlakuannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut :

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk Memberikan hak dan kewajiban, Menjamin hak-hak para subyek hukum, menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui Hukum administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan.
- b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
- c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua), yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Yang dimaksud dengan perlindungan hukum preventif yakni perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan

untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Yang dimaksud dengan perlindungan hukum represif merupakan suatu perlindungan hukum yang berupa sanksi yang diberikan seperti denda, penjara, hukuman tambahan yangmana diberikan setelah adanya sengketa atau terjadinya suatu pelanggaran hukum.

Menurut philipus M. Hudjon dalam perlindungan hukum terdapat suatu sarana yang digunakan, yakni :¹⁶

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Dalam hal perlindungan hukum secara preventif, subyek hukum diberikan kebebasan untuk mengajukan keberatan dan memberikan saran atau usulan sebelum suatu usulan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya masalah di waktu yang akan datang. Dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

¹⁶ Philipus M. hudjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 38.

Perlindungan hukum ini bertujuan sebagai penyelesaian sengketa. di Indonesia penanganan perlindungan ini dilakukan oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi dalam penyelesaian sengketa. prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan sebagai Negara hukum.

Terdapat pengertian perlindungan dalam hukum positif Indonesia adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.¹⁷ Perlindungan sangat diperlukan bagi semua warga negara atas hukum yang berlaku demi tercapainya tujuan hukum dan penegakkan hukum yang memuat 4 (empat) unsur, diantaranya :

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)

C. Kajian Umum Teori Tentang Kepastian Hukum

¹⁷ Pasal 1 butir 6, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Nomor, Tambahan Lembar Negara Nomor.

Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga¹⁸. Dalam perspektif hukum, tema kepastian pada prinsipnya selalu dikaitkan dengan hukum, menjelaskan, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁹ kepastian hukum tidak semata-mata selalu berkaitan dengan negara, karena esensi dari kepastian hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan. Maka itu, aktor-aktor yang mungkin melakukan kesewenang-wenangan, tidak terbatas pada negara saja, tetapi juga oleh sekelompok pihak lain di luar negara.²⁰

Perlindungan terhadap warga negara memang terletak pada negara, jika negara itu mengakui adanya konsep *Rechtstaat*. Dalam konsep ini, suatu negara dianggap menganut prinsip *Rechtstaat*, apabila dalam penyelenggaraan negara itu dilakukan menurut hukum, yang dituangkan dalam konstitusi.²¹ Apabila ada sekelompok pihak di luar negara yang mempunyai kekuasaan dan berpotensi digunakan secara sewenang-wenang, negaralah yang pertama-tama bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya,

¹⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, ed.ke-3 cet.ke-1. Yogyakarta.Liberty. 2007. hlm 34

¹⁹ Op cit Mertokusumo hlm 199

²⁰ Manullang, E.Fernando, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Penerbit Kompas, Jakarta. 2007 hlm 94

²¹ Ibid Manullang

karena negara adalah subjek yang mendapat perintah dari konstitusi dan hukum untuk melaksanakan kepentingan umum menurut hukum yang baik.

Dengan adanya negara dan hukum (konstitusi) yang pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bersama rakyat yang berdaulat, oleh sebab itu nilai kepastian yang berkaitan dengan hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab kepada negara untuk menjalankannya. Di sinilah letak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan peranan negara terlihat.²²

D. Kajian Umum Tentang Perjanjian

Definisi perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeenkomst* dalam bahasa Belanda. Kata *overeenkomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan. Perjanjian merupakan terjemahan dari *vervinten* sedangkan persetujuan merupakan terjemahan dari

²² Op cit Manullang hlm 95

oveereenkomst.²³ Serta dalam sebuah perjanjian memiliki beberapa unsur perjanjian, antara lain :²⁴

- a. Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua orang. Pihak-pihak yang dimaksudkan di sini adalah subyek perjanjian yang dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut juga dapat terdiri dari satu atau lebih badan hukum.
- b. Adanya persetujuan atau kata sepakat. Persetujuan atau kata sepakat yang dimaksudkan adalah konsensus antara para pihak terhadap syarat-syarat dan obyek yang diperjanjikan.
- c. Adanya tujuan yang ingin dicapai Tujuan yang ingin dicapai dimaksudkan di sini sebagai kepentingan para pihak yang akan diwujudkan melalui perjanjian. Dengan membuat perjanjian, pihak yang mengadakan perjanjian, secara “sukarela” mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa

²³ R Setiawan, **Pokok Pokok Hukum Perikatan**, Putra Abardin, Bandung, 1999. hlm.1.

²⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, **Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm . 92.

harta kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah mengikatkan diri tersebut. Dengan sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian.

- d. Adanya prestasi atau kewajiban yang akan dilaksanakan. Prestasi yang dimaksud adalah sebagai kewajiban bagi pihakpihak untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati. Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.
- e. Adanya bentuk tertentu. Bentuk tertentu yang dimaksudkan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentuknya agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Untuk beberapa perjanjian tertentu, undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, yaitu bentuk tertulis sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis tidaklah hanya semata-mata hanya merupakan pembuktian saja, tetapi juga syarat untuk adanya perjanjian itu.
- f. Adanya syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah substansi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian

E. Kajian Umum Tentang Asas-Asas Dalam Perjanjian.

Adapun beberapa asas dalam perjanjian yang harus dipatuhi oleh para pihak yakni sebagai berikut:

- a. Asas Pacta Sunt Servada . Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara , yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa mereka belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang. Oleh karena itu, akibat dari asas pacta sunt servada adalah perjanjian tiak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini disebutkan dalam pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat dua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- b. Asas Konsensualisme. Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya suatusyarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan bahwa perjanjian tersebut telah dilahirkan pada saat telah tercapainya suatu kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dengan begitu, suatu perjanjian telah sah ketika syarat-syarat yang ada dalamPasal 1320 KUHPerdara tersebut telah dipenuhi dan lahir ketika para pihak telah mengucapkan kata sepakat.

- c. Asas Itikad Baik. Dalam KUHPPerdata pada Pasal 1338 ayat (3) menyatakan bahwa : “perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik”. Dengan kata lain, 29 setiap orang atau badan hukum (subyek hukum) yang ingin mengadakan perjanjian harus mempunyai itikad baik. Itikad baik di sini merupakan suatu bentuk perlindungan untuk memberikan perlindungan hukum bagi salah satu pihak yang mempunyai itikad baik dalam perjanjian baik dalam waktu pembuatan perjanjian maupun pada waktu pelaksanaan perjanjian.
- d. Asas Kepribadian. Asas ini berhubungan dengan subyek yang terikat dalam suatu perjanjian. Asas kepribadian dalam KUHPPerdata diatur dalam pasal 1340 ayat (1) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan mengenai hal ini ada pengecualiannya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1337 KUHPPerdata yaitu, dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.
- e. Asas Kebebasan Berkontrak. Hal ini menjelaskan bahwa, setiap subyek hukum mempunyai kebebasan dalam mengadakan suatu bentuk perjanjian apa saja maupun perjanjian yang telah diatur dalam undang-undang. Perbuatan ini mengasumsikan bahwa adanya

suatu kebebasan tertentu di dalam masyarakat untuk dapat turut serta di dalam lalu lintas yuridis. Dengan kata lain, kebebasan berkontrak adalah begitu esensial, baik bagi individu untuk mengembangkan diri di dalam kehidupan pribadi dan didalam lalu lintas kemasyarakatan serta untuk mengindahkan kepentingan-kepentingan harta kekayaannya, maupun bagi masyarakatnya sebagai suatu kesatuan, sehingga hal-hal tersebut oleh beberapa peneliti dianggap sebagai suatu hak dasar.²⁵

F. Kajian Umum Tentang Pengertian Distributor Dan Produsen.

a. Pengertian Distributor

Distributor merupakan pihak yang melakukan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan).

Adapun yang menjadi manfaat distributor adalah sebagai berikut:²⁶

- 1) Menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen.
- 2) Mempercepat sampainya hasil produksi ketangan konsumen.
- 3) Tercapainya pemerataan produksi.
- 4) Menjaga kontinuitas produksi.
- 5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.

²⁵ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, , **Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern**, PT Refika Aditama, Bandung, 2004 Hlm. 99.

²⁶ <http://repository.uin-suska.ac.id/6749/4/BAB%20III.pdf> diakses tanggal 21 oktober 2018 pukul 9.52.

6) Meningkatkan nilai guna barang dan jasa.

Distributor juga mempunyai tugas yakni sebagai berikut:

- 1) Pengangkutan (*Transportasi*) Pada umumnya tempat kegiatan produksi berbeda dengan tempat konsumen. Perbedaan tempat ini harus diatasi dengan kegiatan pengangkutan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin majunya teknologi, maka kebutuhan manusia pun semakin bertambah banyak. Hal ini mengakibatkan barang yang disalurkan semakin besar sehingga membutuhkan alat transportasi (pengangkutan).
- 2) Penjualan (*Selling*) Di dalam pemasaran barang selalu ada kegiatan menjual yang dilakukan oleh produsen. Pengalihan hak dari produsen kepada konsumen dapat dilakukan dengan penjualan. Dengan adanya kegiatan penjualan maka konsumen dapat menggunakan barang tersebut.
- 3) Pembelian (*Buying*) Setiap ada penjualan berarti ada kegiatan pembelian. Jika penjualan barang dilakukan oleh produsen maka pembelian dilakukan oleh orang yang membutuhkan barang tersebut.
- 4) Penyimpanan (*Storing*) Sebelum barang disalurkan kepada konsumen, biasanya disimpan terlebih dahulu. Dalam menjamin kesinambungan, keselamatan, dan keutuhan barang-barang perlu adanya penyimpanan (pergudangan).

- 5) Pembakuan Standar Kualitas Barang Dalam setiap transaksi jual beli, banyak penjual maupun pembeli selalu menghendaki adanya ketentuan mutu, jenis, dan ukuran barang yang akan diperjualbelikan. Oleh karena itu perlu adanya pembakuan standar baik jenis, ukuran, maupun kualitas barang yang akan 25 diperjualbelikan dengan tujuan barang yang akan diperdagangkan atau salurkan sesuai dengan yang diharapkan.
- 6) Penanggung Resiko Seorang distributor harus menanggung resiko baik kerusakan maupun penyusutan barang.

b. Pengertian produsen

Produsen seringkali diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir dan pengaeceer profesiona, yaitu setiap orang dan atau/badan yang diikuti serta dalam penyediaan barang atau jasa hingga sampai ke tangan konsumen.²⁷ Produsen sering juga disebut sebagai pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan atau penolong dan bahan lainnya). Mereka dapat terdiri dari dari orang atau badan usaha yang memproduksi sandang, orang atau badan usaha yang berkaitan dengan pembbuatan perumahan dan lain sebagainya.

²⁷ Janus sidobalok, 2010.**Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia**. Citra Aditya.jakarta. Hlm 13

Menurut pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Produsen sendiri memiliki hak dan kewajiban diantaranya sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

G. Kajian Umum Tentang Wanprestasi

Wanprestasi atau cidera janji sering terjadi dan dilakukan oleh subyek hukum, hal yang sering dikaitkan dengan cidera janji adalah ketika seseorang berutang kepada orang lain dan orang tersebut tidak membayar hutangnya atau tidak menyanggupi hutangnya kepada orang tersebut. Cidera janji merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum karena melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang baik undang-undang perdata maupun pidana.

Suatu perbuatan bisa dikatakan Cidera janji jika memenuhi atau masuk dalam beberapa perbuatan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,

Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris tidak hanya tertuju pada masyarakat atau pemilik merek, tetapi juga ditinjau dari sisi hukum dan fasilitas yang disediakan menunjang pelaksanaan peraturan mengenai merek.¹ Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana perlindungan bagi produsen terhadap distributor yang melakukan wanprestasi.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini dimanfaatkan untuk menganalisa dan memberikan jawaban untuk mengefektifkan hukum itu sendiri.

Metode pendekatan yuridis sosiologis ini adalah untuk memudahkan bagi penulis dalam melakukan penelitian dan pengambilan data-data dengan berdasar kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai masalah yang dibahas.² Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan untuk mengkaji aspek-aspek hukum dengan melihat langsung fakta di lapangan tentang perlindungan hukum bagi produsen terhadap distributor yang melakukan wanprestasi.

¹ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 32

² Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian ini dilakukan di Industri Kopi dengan merek CR.1 di kabupaten Gresik. Penulis memilih lokasi ini karena CR.1 merupakan industri penyedia kopi bagi kota-kota besar tetapi seiring berkembangnya waktu terjadi kecurangan dengan memodifikasi dengan cara merubah takaran dan komposisi dari kopi merek CR.1 ini. Selain itu untuk melindungi pemegang merek agar tidak terjadi kerugian

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.³

Sumber data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari produsen pemilik Merek CR.1 di Kabupaten Gresik.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan. Surat-surat pribadi, dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.⁴

³ Iqbal Hasan, **Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 82

⁴ S. Nasution, **Metode Research**, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 143

Sumber data sekunder diperoleh dari sejumlah keterangan dan fakta yang digunakan oleh seseorang dan secara tidak langsung diperoleh dari berkas-berkas yang mendukung penelitian dalam pelaksanaan perlindungan bagi produsen terhadap distributor yang melakukan wanprestasi.

E. Teknik Memperoleh Data

Data primer diperoleh dari pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara (*interview*). yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak Pemilik Merek industri kopi CR.1 di Kabupaten Gresik. Data sekunder diperoleh dari pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan menelaah dokumen-dokumen dan arsip-arsip serta literatur dan perundang-undangan yang berkaitan kaitannya dengan data primer.

F. Populasi, Sampel, dan Teknik Penentuan Responden

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu dan tempat, dengan sifat dan ciri yang sama.⁵ Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pihak dari produsen sendiri yakni CV.Linggar Sentosa karena merupakan pemilik kopi CR1 serta beberapa para konsumen kopi CR1 yang telah dipilih karena sudah mengosumsi kopi

⁵ Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 118

CR1 milik CV.Linggar Sentosa yang dibeli dari pihak distributor wanprestasi.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari pada populasi.⁶ sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Random sampling*, Dimana sampel dipilih berdasarkan random Sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilik Industri Kopi Merek CR.1
2. Pihak Konsumen yang terdiri dari agen kopi CR1 yang berada di kota malang dengan alasan, agen tersebut merupakan agen terbesar dan diutamakan oleh pihak produsen.

c. Teknik Penentuan Responden

Responden adalah orang-orang yang dipilih oleh peneliti untuk diteliti.⁷ Pemilihan responden dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subyek atau ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.⁸

⁶ Ibid., hlm. 119

⁷ Amirudin dan H. Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2008, hlm. 70

⁸ Ibid., hlm. 106

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, pengolahan teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu cara penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, serta perilaku responden yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh dan mendalam.⁹ Teknik menganalisis data menggunakan teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

H. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini digunakan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi suatu hal dari hal yang dapat mencederainya.
- b. Hukum adalah norma-norma yang mengatur kehidupan di masyarakat.
- c. Perjanjian adalah suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan adanya hak-hak dan kewajiban.
- d. Wanprestasi adalah sesuatu perbuatan atau tindakan tidak memenuhi prestasi atau mencederai perjanjian yang telah disepakati yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

⁹ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, **Metodelogi Penelitian**, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 250



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang CV Linggar Sentosa

CV yang akan diteliti adalah CV Linggar Sentosa dimana telah terdaftar pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik dengan Nomor TDP 13.02.3.47.04994 dengan nama pengurus atau penanggung jawab Choiri yang berkedudukan di Desa Kedungrukem Rukun Tetangga 07 Rukun Warga 03 Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, kegiatan usaha pokok perdagangan biji kopi dan bubuk kopi dalam kemasan, makanan dan minuman. Berikut merupakan daftar jenis dan nomor produk pangan industry rumah tangga, yakni:¹

Tabel 2
Jenis dan Nomor Produk Pangan CV Linggar Sentosa

NO	JENIS PANGAN	NOMOR PRODUK PANGAN
1.	KOPI BUBUK	P-IRT 5103525011059-19
2.	KOPI SANGRAI	P-IRT 5103525021059-19
3.	TEH DAUN KOPI	P-IRT 5103525031059-19
4.	KUE BASAH	P-IRT 5103525041059-19
5.	SNACK KOPI	P-IRT 5103525051059-19
6.	MINUMAN KOPI	P-IRT 5103525061059-19
7.	KUE KERING	P-IRT 5103525071059-19
8.	PENGEMASAN GULA PASIR	P-IRT 5103525081059-19

¹Hasil wawancara dengan pemilik Merek CR 1, Bapak Choiri, Pada tanggal senin 09 April 2018 di Kabupaten Gresik

Sumber : *Hasil Wawancara dengan Pemilik Merek CR1, diolah 2018*

Dalam CV Linggar sentosa tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yakni Produksi Makanan dan Minuman. Dalam Produksi Minuman yakni terdiri dari Kopi Bubuk, Kopi Sangrai, Teh Daun Kopi, Minuman Kopi. Terdapat bagian-bagian tertentu dalam Merek Kopi CR1, diantaranya:²

a. Direktur

Direktur mempunyai peran memimpin jalannya perusahaan, mengambil keputusan mengenai perusahaan, sinkronisasi perencanaan anggaran

b. Bagian Keuangan

Bagian keuangan mempunyai peran yakni membuat perencanaan anggaran dan mengelola keuangan perusahaan

c. Bagian Administrasi

Bagian administrasi ini berperan untuk melakukan pencatatan stok barang, mengawasi keluar masuknya barang, membuat perencanaan pembelian dan penjualan barang

d. Bagian penjualan

Bagian penjualan ini merupakan bagian penjualan yang dilakukan oleh beberapa pegawai. Pemasaran dilakukan dengan mengirim kepada mitra yang menjalin kerja sama dengan kopi CR1 serta dijual secara langsung, mengatur jadwal pengiriman, dan menerima pesanan.

e. Bagian Produksi

² Hasil wawancara dengan pemilik Merek CR1, Bapak Choiri, Pada tanggal senin 09 April 2018 di Kabupaten Gresik

Dalam bagian produksi dilakukan pemilihan bahan baku dipilih dengan kualitas baik dalam pembuatan baik kopi bubuk maupun minuman kopi.

f. Bagian produksi

Bagian produk ini termasuk dalam pengelolaan bahan baku hingga telah siapnya produk yang akan dijual termasuk bagian pengemasan yakni, Setelah dilakukan proses pengelolaan maka dilakukan pengemasan. Dalam bagian ini terdapat merek yang telah di daftarkan untuk dipakai sebagai logo maupun nama dari barang yang dijual serta Bagian Pemasaran. Bagian pemasaran ini merupakan bagian penjualan yang dilakukan oleh beberapa pegawai. Pemasaran dilakukan dnegan mengirim kepada mitra yang menjalin kerja sama dengan kopi CR1 serta dijual secara langsung. Untuk produksi makanan berupa kue basah dan kue kering terdiri atas pembuatan bahan, peroses pemanggangan atau pembuatan, dan pemasaran.

B. Perlindungan Hukum Bagi Produsen Kopi CR1 Dalam Perjanjian Kerjasama Dengan Distributor Yang Melakukan Wanprestasi Sesuai Pasal 1234 KUHPerdota.

Perlindungan Hukum bagi produsen dalam perjanjian kerjasama dengan distributor yang melakukan wanprestasi secara khusus belum ada yang mengaturnya. Maka berdasarkan tujuan hukum yakni dengan kepastian hukum ,keadilan dan kemanfaatan pihak yang dirugikan yakni produsen berhak melakukan beberapa tindakan. Wanprestasi merupakan ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi

dari suatu perjanjian. Wujud dari wanprestasi tersebut bermacam-macam diantaranya adalah sebagai berikut :³

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Perbuatan wanprestasi ini merupakan suatu perbuatan yang telah jelas dilarang oleh undang-undang yakni **Pasal 1238 KUHPerdara** yang berbunyi

“si berutang adalah lalai , apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akata sejenis itu telah dinyatakan lalai , atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan .”

Wanprestasi atau cidera janji merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum karena melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang baik undang-undang perdata maupun pidana. Kerugian yang didapatkan oleh pihak CV. Linggar Sentosa sendiri diperkirakan hingga jutaan rupiah karena hal tersebut maka CV. Linggar Sentosa sebagai produsen berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara mempunyai hak-hak untuk mengganti kerugiannya sebagai bentuk perlindungan hukum. CV. Linggar Sentosa sebagai pihak produsen memiliki hak-hak yang dibenarkan oleh undang-undang. Namun secara hukum pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum bagi produsen terhadap

³ R.Subekti, **Hukum Perjanjian** Cet.ke-II,Jakarta: Pembimbing Masa, 1970, hlm 50

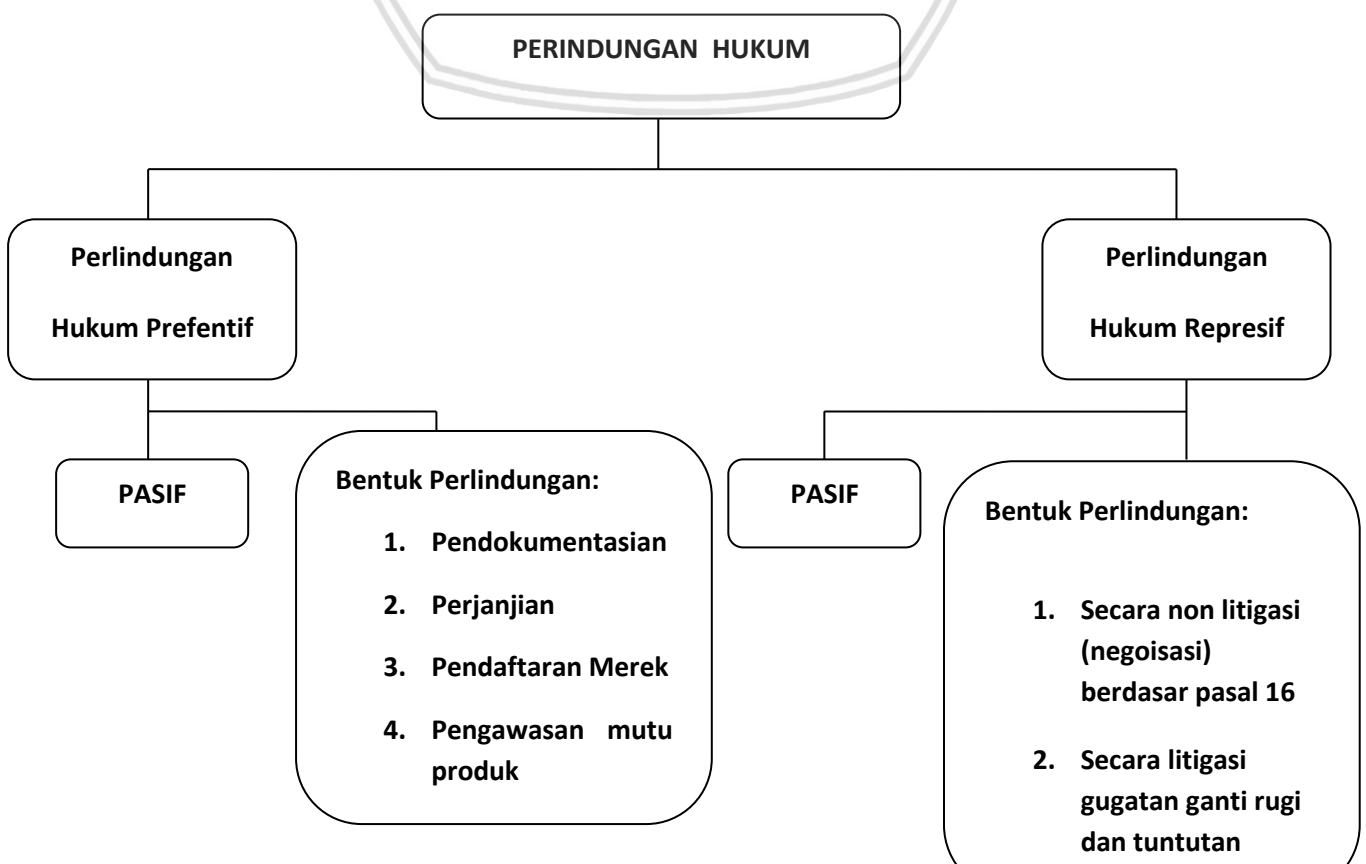
distributor yang melakukan wanprestasi belum ada, hanya ada ketentuan secara umum yang terdapat dalam pasal 1234 KUHPerdara yang menjadi dasar pemenuhan atas kerugian pihak produsen. Bunyi pasal 1234 KUHPerdara yakni sebagai berikut:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan. Apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya. Atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Berdasarkan hal tersebut, perlunya upaya-upaya dan cara-cara agar hak-hak produsen sebagai pihak yang dirugikan dapat dipenuhi baik secara materiil maupun immaterial

perlindungan ini dilakukan untuk mendapatkan hak-hak yang telah dicerai oleh suatu perbuatan sehingga timbulnya kerugian baik materiil maupun immateriil. Berikut merupakan bagan alir mengenai upaya perlindungan bagi pemilik merek kopi bubuk CR1.

Bagan Alir 1 Perlindungan Hukum Produsen Kopi CR1



Sumber: *Data Primer, Diolah 2018*

1. Upaya perlindungan hukum preventif yang dilakukan produsen kopi bubuk CR1

Upaya perlindungan preventif yang dilakukan adalah dengan beberapa cara yakni sebagai berikut :

a) melakukan pendokumentasian ,

Pendokumentasian dilakuakna dengan maksud untuk mencari pembuktian mengenai kecurangan yang dilakukan terhadap produk kopi bubuk CR1 ini. Pendokumentasian ini dapat berupa suatu foto ataupun testimoni dari konsumen kopi bubuk CR1 ini.

b) melakukan pendaftaran merek

Pendaftaran Merek dilakukan untuk alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan, sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftarannya oleh orang lain untuk barang dan/atau jasa sejenis pada Kantor Merek, dan juga sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek CR1 yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang dan/atau jasa sejenis di pasaran

c) melakukan pengawasan mutu kopi.

Yang Terakhir dengan melakukan pengawasan mutu kopi yang bertujuan untuk menjamin kualitas dan upaya untuk meningkatkan dan menstabilkan proses produksi kopi CR1.



2. perlindungan hukum represif

Upaya perlindungan represif terdapat 2 (dua), yakni sebagai berikut:

a) dengan cara non litigasi

Upaya represif dengan cara non litigasi berdasarkan pasal 16 ayat 1 perjanjian kerjasama antara produsen dengan distributor yang berbunyi:

“dalam hal terjadi perselisihan maka pihak pertama dan pihak kedua sepakat dan setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila belum tercapai kesepakatan maka para pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan menunjukan pengadilan negeri gresik atau malang, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Negara kesatuan republik indonesia.”

Berdasarkan hal diatas dilakukan dengan cara melakukan suatu pertemuan atau perundingan antar pihak-pihak terkait mengenai masalah yang dihadapi. Biasa yang dalam melakukan upaya perlindungan represif secara non litigasi ini dapat dilakukan secara kekeluargaan dengan kepala dingin untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah yang adil bagi kedua belah pihak. Tetapi jika kerugian yang diderita oleh pemilik merek kopi bubuk CR1 ini besar maka akan dilakukan upaya represif secara litigasi atau dengan melakukan gugatan secara hukum bagi pelaku kecurangan ini mengingat biaya yang ditimbulkan dalam masalah ini cukup besar.

b) cara litigasi. Tentunya dengan waktu yang tidak sebentar jika melakukan upaya represif secara litigasi. Upaya litigasi adalah proses dimana seorang individu atau badan bersengketa, dan membawa kasusnya ke pengadilan atau pengaduan dan penyelesaian tuntutan atau

penggantian atas kerusakan maupun kerugian . Proses pengadilan juga dikenal sebagai tuntutan hukum dan dengan kata lain istilah biasanya mengacu pada persidangan pengadilan. Mereka digunakan terutama ketika sengketa atau keluhan tidak bisa diselesaikan dengan cara lain. Cara ini bisa dilakukan dengan cara mengajukan beberapa bentuk gugatan dan tuntutan.

- 1) Produsen yakni CV.Linggar Sentosa melakukan pengajuan gugatan ke pengadilan negeri dimana isi dari gugatan tersebut adalah gugatan wanprestasi serta perbuatan melawan hukum. Hal itu dibuktikan dengan distributor telah melanggar kesepakatan yang tertuang dalam surat perjanjian kerjasama yang dibuat oleh kedua belah pihak. Bukti kedua adalah distributor dengan sengaja mengubah isi takaran produk kopi CR1 milik CV.Linggar Sentosa yang mengakibatkan timbul kerugian yang didapat oleh CV.Linggar Sentosa. Hal tersebut tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1238 , 1234, dan 1365 KUHPerdata. Dimana masing-masing bunyi pasal tersebut yakni sebagai berikut:

Pasal 1238 KUHPerdata yang berbunyi:

“si berutang adalah lalai , apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akata sejenis itu telah dinyatakan lalai , atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan .”

Pasal 1234 KUHPerdata yang berbunyi:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan. Apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya. Atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:

“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seseorang lainnya, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Berdasarkan tiga pasal tersebut maka produsen mendapatkan perlindungan secara sah dan secara hukum untuk melakukan upaya penggantian kerugian yang disebabkan oleh distributor.

Distributor dengan secara hukum wajib mengganti kerugian yang telah diderita pihak produsen karena perbuatan yang telah dilakukannya. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan hak kepada merek terdaftar untuk mengajukan gugatan kepada orang atau badan hukum yang secara sengaja dan tanpa hak menggunakan merek atau merek yang digunakan mempunyai kesamaan pada keseluruhan dengan merek yang ditiru. Klasifikasinya yakni terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang tentang Merek yakni peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:

- a. pembungkus atau kemasan;
- b. keterangan dalam iklan;
- c. keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau
- d. informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.

Gugatan mengenai merek terdapat dalam Pasal 67 Ayat

1 Undang-Undang Tentang Merek, menjelaskan bahwa :

“Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat diajukan gugatan.”

Gugatan yang diajukan bertujuan untuk mendapatkan ganti rugi atas penyamaan merek yang telah terdaftar. Terdapat 3 (tiga) syarat agar gugatan dapat diajukan yakni:

1. Merek yang digunakan tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhan dengan merek orang lain.
2. Dan merek orang lain itu, sudah terdaftar dalam DUM (Daftar Umum Merek).
3. Serta penggunaan tanpa hak.

Gugatan ganti rugi dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immaterial berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga pihak berhak

menderita kerugian secara moral. Oleh karena itu, sepanjang mengenai tuntutan ganti rugi yang didasarkan kepada kedua peristiwa di atas berlaku juga ketentuan yang termuat di dalam KUH Perdata. Yang disebut terakhir ini berfungsi sebagai *Lex Generalis*, sedangkan Undang-Undang tentang Merek sendiri sebagai *Lex Specialis*. Hak atas merek merupakan hak milik perseorangan, tetapi tidak menyebabkan hapusnya tuntutan hukuman pidana terhadap pelanggar hak atas merek terdaftar. Pengenaan sanksi bagi pemakai merek yang terdaftar tanpa hak terdapat dalam Pasal 100 Ayat 1, menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Yang dimaksud dengan kata *tanpa hak* dalam Pasal 90 tersebut adalah merek yang digunakan “tidak terdaftar” dan sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang untuk barang dan/atau jasa sejenis. Cara penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dikenal dengan beberapa cara penyelesaian sengketa, yaitu:

1. arbitrase;

Cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁴

2. konsultasi;

Suatu tindakan yang dilakukan pihak tertentu (perorangan/personal) dengan pihak lain yang ahli dalam suatu bidang (konsultan) yang mana pihak konsultan memberikan pendapat kepada klien sesuai dengan yang diperlukan oleh klien.⁵ Menurut Maran dan Jimmy P menjelaskan bahwa dilakukannya permohonan nasihat atau pendapat yang dilakukan oleh seorang konsultan untuk menyelesaikan suatu sengketa atau permasalahan yang dihadapi secara kekeluargaan atau dengan adanya pihak ketiga sebagai penengah.⁶

3. negoisasi;

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para piphak yang bersengketa atau dengan kata lain tidak adanya campur tangan pihak ketiga di dalamnya, sehingga tidak adanya aturan yang baku mengenai mekanisme dalam

⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁵ Frans Hendra Winarta, **Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional**, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hlm. 7

⁶ Munir Fuady, **Arbitrase Nasional (ALternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 12

penyelesaiannya untuk itu akan diserahkan kembali kepada para pihak kemudian akan diambil hasil dari negosiasi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁷ Dalam pelaksanaannya penyelesaian sengketa dengan metode negosiasi dilakukan karena 2 (dua) hal, yakni :⁸

- a. untuk melakukan pencarian terhadap sesuatu yang baru dimana tidak dapat diperoleh dengan usaha sendiri
 - b. untuk menemukan solusi terbaik atas terjadinya perpecahan atau sengketa diantara para pihak.
4. mediasi;

Suatu penyelesaian sengketa dengan adanya pihak ketiga atau yang disebut dengan mediator yang bersifat netral atau tidak memihak yang berguna sebagai penengah diantara para pihak yang kemudian memberikan masukan mengenai alternatif-alternatif yang harus dilakukan oleh para pihak. Dalam peradilan juga disediakan mediasi bagi pihak yang bersengketa dimana mediator telah ditentukan oleh pengadilan yang berguna untuk melakukan perundingan agar terjadi kesepakatan antara para pihak, hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁷ Muryati, Dewi Tuti dan B. Rini Heryanti, **Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan**, Jurnal Dinamika Sosial Budaya Nomor 1, 2011, hlm 56

⁸ Ibid, hlm 55

5. konsiliasi; atau penilaian ahli,

Penyelesaian sengketa dengan penilaian ahli yakni mendatangkan para ahli didalam suatu bidang yang mana berfungsi untuk menjelaskan mengenai hal yang diperlukan oleh para pihak. Ahli yang didapatkan bukan sebagai pihak ketiga melainkan hanya menjelaskan mengenai sesuatu yang diperlukan oleh para pihak dalam menyelesaikan suatu sengketa.

Mengenai perlindungan hukum terhadap merek yakni Tindakan represif oleh peradilan umum. Selain jaminan perlindungan yang diberikan Ditjen HKI, Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung mempunyai peranan berbentuk tindakan represif untuk menghukum pemalsu atau pembajak Merek. Pada kenyataannya, perlindungan hukum atas Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek tidak cukup memberikan jaminan. Apabila terdapat alasan yang sah menurut hukum, pendaftaran dapat dihapuskan atau dibatalkan. Salah satu alasan Merek dihapuskan dalam Daftar Umum Merek adalah Merek tidak dipergunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang

dapat diterima oleh Ditjen HKI atau biasanya disebut Merek non use..

- 2) **Produsen dapat melaporkan pihak distributor kepada polisi dengan laporan penipuan sesuai pasal pidana Tindakan Penipuan sesuai dengan pasal 378 kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi :**

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dimana dalam hal ini pihak distributor telah mencantumkan isi yang tidak sama dengan isi dari kopi merek CR1. Serta pihak dari Distributor tanpa persetujuan dari pihak produsen sebagai pemilik merek kopi CR1 telah mengubah takaran dan kualitas dari kopi tersebut. Padahal sudah jelas tidak ada tanda tangan persetujuan dari pihak Distributor. Merek merupakan suatu karya hasil pemikiran manusia yang bernilai ekonomis, dalam dunia usaha tidak terpungkiri jika suatu merek terkenal dapat ditiru oleh pengusaha lain yang dengan itikad tidak baik untuk membuat pemikiran seolah-olah mereknya sama dengan merek

perusahaan yang telah didaftarkan. Dalam hal ini yang terjadi pada CV Linggar Sentosa jadi dengan produknya yakni kopi bubuk CR1 dimana telah secara hukum mempunyai hak atas merek yang wajib memperoleh perlindungan terkait persamaan pada kopi bubuk CR1 ini.

Menurut pemaparan diatas penulis memaparkan teori perlindungan hukum untuk mencari jawaban atas permasalahan ini. Untuk itu dalam Penelitian ini penulis menggunakan teori yang dikemukakan Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁹ Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.

Sesuai dengan hal tersebut maka peran pemerintah sangat diperlukan dalam menyelaraskan dan memberikan perlindungan hukum bagi setiap warganya.

Bentuk pengayoman yang diberikan diataranya dengan memberikan

⁹ Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.55

kebijakan atau aturan hukum dalam kasus ini berbentuk peraturan tentang perlindungan hukum bagi produsen dalam memenuhi hak-haknya.

2. Jaminan kepastian hukum.

Jaminan kepastian hukum merupakan jaminan atas suatu ketentuan terhadap subyek hukum. Jika dikaitkan dengan kasus ini maka Kepastian hukum sangat diperlukan karena belum diaturnya undang-undang mengenai perlindungan hukum bagi produsen yang dicerai janjinya oleh pihak distributor.

3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.

Hukum yang pasti serta perundang-undangan yang telah ditetapkan mengatur hak-hak dan kewajiban serta ketentuan-ketentuan yang berhubungan lainnya. Setiap warga Negara wajib untuk mendapatkan pemenuhan atas hak-haknya.

4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Dengan dibentuknya peraturan-peraturan yang dituangkan dalam Undang-Undang maka setiap orang wajib mematuhi dan jika ada yang melanggarnya maka sanksi akan diterapkannya. Dan proses hukum akan melekat padanya.

Esensi perlindungan hukum terhadap produsen adalah suatu perlindungan yang memberikan jaminan bagi seorang produsen, bahwa ia akan dapat ganti rugi dengan situasi yang fair terhadap para pihak yang terkait dengan hukum, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Perlindungan hukum sangat diperlukan dalam memenuhi semua hak-hak para produsen, tentunya kepastian hukum

dalam setiap kegiatan yang dilakukan tetap dibatasi oleh undang-undang sehingga meminimalisir adanya kecurangan atau perbuatan yang dapat merugikan pihak produsen.

Lingkungan sosial dalam masyarakat dimana bertujuan untuk menilai suatu hukum tersebut dengan suatu hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁰ Hal ini dapat dilihat dari tanggapan masyarakat mengenai hukum. Budaya hukum yang terjadi dalam masyarakat ini cenderung pada pemanfaatan merek terkenal untuk dipakai. Biasanya terdapat perbedaan dari kata maupun logo. Budaya hukum ini dibuktikan dengan adanya responden yakni seluruh pihak yang menggunakan merek CR1 dan sampel yang digunakan dimana sampel tersebut dibagi menjadi 2, yakni

Bagan Alir 2
Bagan penentuan Sampel dan Responden



¹⁰ Hasil Kabupa... merek CR... senin 09 April 2018 di



Sumber : *hasil wawancara dengan pemilik merek, diolah 2018*

Penentuan mengenai sampel dan/atau responden dipilih oleh penulis dengan cara mewawancarai agen-agen atau mitra-mitra dari CV Linggar sentosa yang tersebar di beberapa daerah, diantaranya:

1. Mitra yang bekerjasama dengan CR1

Mitra yang bekerja sama dengan CR1 terdiri dari pemilik kedai kopi yang terdapat di banyak daerah dan akan dipilih beberapa, diantaranya:

a. Kota Gresik

Sampel kota gresik yakni bapak ahmad, bapak sulhan, bapak ismail, bapak anwar menggunakan produk CR1 untuk usaha-usahanya yang ada di kota gresik.

b. Kota Malang

Sampel kota malang yakni bapak aan, bapak rizki, yang menggunakan produk CR1 untuk usahanya yang berada di Kota Malang.

c. Kota Surabaya

Sampel kota Surabaya yakni bapak amir, bapak reza, bapak andik, yang menggunakan produk CR1 untuk usaha di Kota Surabaya

2. Konsumen produk CR1

Konsumen dari produk kopi bubuk CR1 ini terdiri dari 10 (sepuluh) orang yakni diantaranya, Toni, Ilham, Bagus, Reza, Indri, Dio, Febri, Dafa, Farid, dan Wahyu. Dalam wawancara yang dilakukan oleh konsumen-konsumen tersebut penulis menyimpulkan bahwa terjadi perubahan rasa dari kopi bubuk CR1 dimana rasa kopi bubuk CR1 tidak seperti sebelumnya. Tetapi dalam budaya hukum ini terdapat permasalahan dari kopi bubuk CR1 yakni tindakan curang yang dilakukan oleh distributor kopi bubuk CR! Yakni Unyil Coffee. Unyil Coffee melakukan tindakan mengganti isi dari kemasan kopi bubuk CR1 dengan olahannya sendiri serta mengatasnamakan produk CR1. Hal ini dapat mempunyai akibat buruk bagi industri produk CR1.

C. HAMBATAN DAN UPAYA YANG DILAKUKAN TERKAIT PERLINDUNGAN BAGI PRODUSEN KOPI CR1 DALAM PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN DISTRIBUTOR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI.

- a. Berikut merupakan hambatan – hambatan yang dialami oleh pemilik Merek Kopi CR1 dimana hambatan tersebut diperoleh dari *internal* dan *ekternal*
1. Hambatan yang diperoleh dari internal yakni sebagai berikut:¹¹

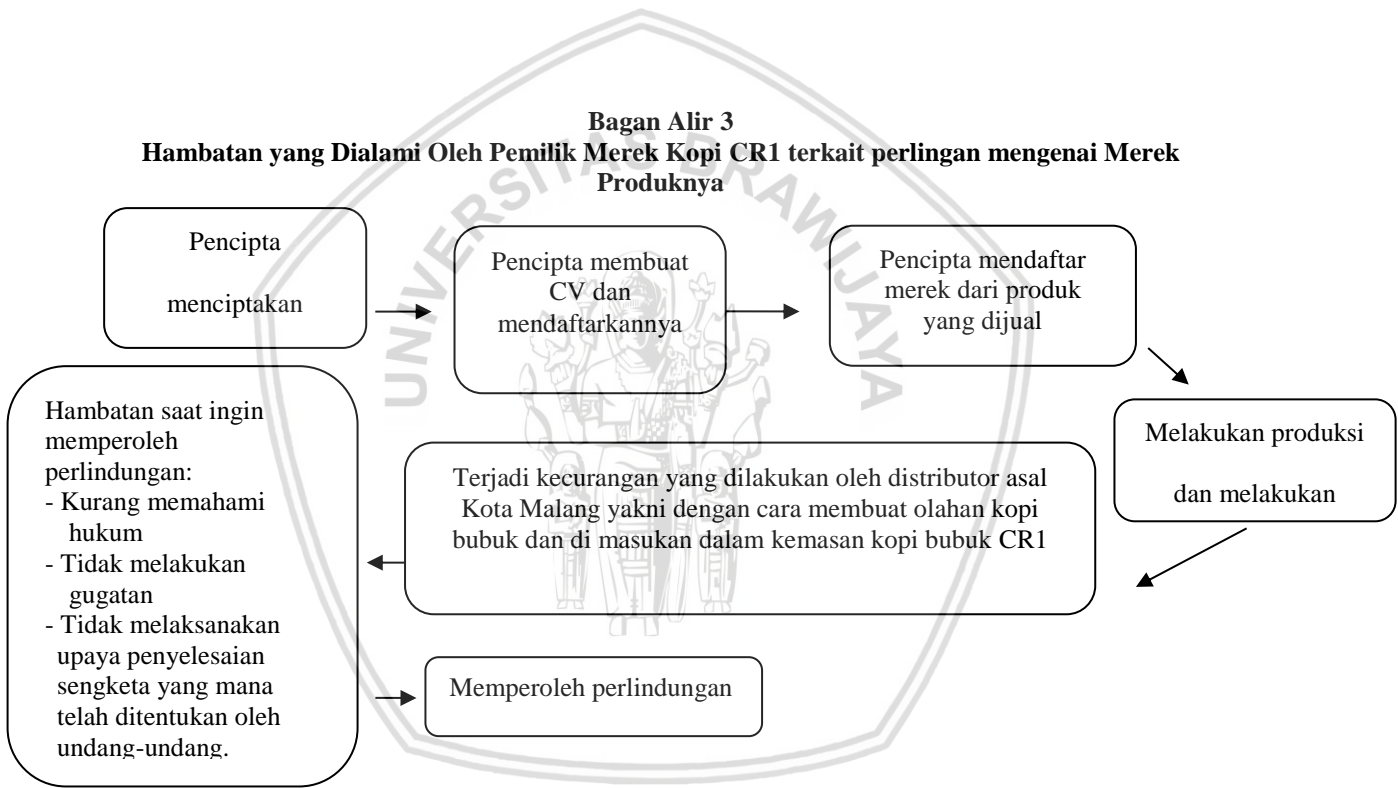
¹¹ Hasil wawancara dengan pemilik Merek CR1. Bapak Choiri, Pada tanggal senin 09 April 2018 di Kabupaten Gresik

- 1) Kurangnya memahami hukum sendiri menjadikan salah satu faktor penghambat untuk mencari keadilan kepada hukum serta menuntut hak-haknya sebagai pemilik kopi bubuk CR1 sesuai dengan haknya
- 2) Tidak melakukan gugatan, Pengetahuan mengenai hukum yang rendah menjadikan salah satu hambatan ini muncul yakni tidak adanya gugatan
- 3) Kurangnya pengawasan dari pihak produsen terhadap pendistribusian produk serta proses perdagangan yang dilakukan oleh pihak distributor
- 4) Kurangnya ketelitian dalam mengatur pola perjanjian dan proses pengiriman produk terhadap distributor.
- 5) Kurangnya tenaga ahli hukum yang bertugas dalam proses penindaklanjutan terhadap proses pelanggaran hukum yang dilakukan oleh distributor.

2. Hambatan yang diperoleh dari eksternal yakni sebagai berikut:

- 1) Hambatan yang dialami oleh pemilik merek kopi bubuk CR1 adalah dimana Terjadi kecurangan yang dilakukan oleh distributor asal Kota Malang yakni dengan cara membuat olahan kopi bubuk dan di masukan dalam kemasan kopi bubuk CR1 Berikut merupakan bagan alir dari hambatan yang dialami. ia tidak melakukan gugatan mengenai kecurangan yang dilakukan

ditributornya.¹² Berikut merupakan bagan alir dari hambatan yang dialami.



Sumber : *Data Primer, Diolah 2018*

b. Upaya-upaya hukum yang telah dilakukan CV. Linggar Sentosa

Tabel 3
Upaya Hukum Preventif

¹² Hasil wawancara dengan pemilik Merek CR1, Bapak Choiri, Pada tanggal senin 09 April 2018 di kabupaten Gresik

Jenis Upaya	Keterangan
Pendokumentasian	Pendokumentasian ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan bahwa benar terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Unyil Coffee terhadap produk kopi bubuk CR1 dengan cara memasukkan kopi bubuk olahan sendiri kedalam kemasan kopi bubuk CR1.
Pendaftaran Merek	<p>Pendaftaran Merek ini dilakukan untuk</p> <ul style="list-style-type: none">- Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan;- Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftarannya oleh orang lain untuk barang dan/atau jasa sejenis pada Kantor Merek;- Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang dan/atau jasa sejenis di pasaran.

Melakukan Quality Control	Quality Control ini bertujuan untuk menjamin kualitas dan upaya untuk meningkatkan dan menstabilkan proses produksi kopi CR1.
------------------------------	---

Sumber : *Data Primer, diolah 2018*

Upaya perlindungan preventif yang dilakukan adalah dengan cara melakukan pendokumentasian, melakukan pendaftaran merek dan melakukan *Quality Control*. Pendokumentasian dilakukan dengan maksud untuk mencari pembuktian mengenai kecurangan yang dilakukan terhadap produk kopi bubuk CR1 ini. Pendokumentasian ini dapat berupa suatu foto ataupun testimoni dari konsumen kopi bubuk CR1 ini. Pendaftaran Merek dilakukan untuk alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan, sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftarannya oleh orang lain untuk barang dan/atau jasa sejenis pada Kantor Merek, dan juga sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek CR1 yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang dan/atau jasa sejenis di pasaran Yang Terakhir dengan melakukan *Quality Control* yang bertujuan untuk menjamin kualitas dan upaya untuk meningkatkan dan menstabilkan proses produksi kopi CR1.

Tabel 4
Upaya Hukum Represif

No	Jenis Upaya	Keterangan
----	-------------	------------

1	Secara Non Litigasi	Upaya represif secara non litigasi merupakan dengan cara negosiasi atau musyawarah dengan mempertemukan pihak yang berkepentingan dengan tujuan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.
2	Secara Litigasi	Upaya represif secara litigasi merupakan suatu upaya yang jarang dilakukan bahkan tidak dilakukan oleh pemilik merek kopi bubuk CR1 dengan banyak sekali pertimbangan. Tetapi jika terjadi kerugian yang besar maka upaya ini akan dilakukan.

Sumber : *Data Primer, diolah 2018*

Pada dasarnya yang dalam melakukan upaya perlindungan represif secara non litigasi ini dapat dilakukan secara kekeluargaan dengan kepala dingin untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah yang adil bagi kedua belah pihak. Tetapi jika kerugian yang diderita oleh pemilik merek kopi bubuk CR1 ini besar maka akan dilakukn upaya represif secara litigasi atau dengan

melakukan gugatan secara hukum bagi pelaku kecurangan ini mengingat biaya yang ditimbulkan dalam masalah ini cukup besar. Tentunya dengan waktu yang tidak sebentar jika melakukan upaya represif secara litigasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya yaitu Perlindungan Hukum bagi produsen dalam perjanjian kerjasama dengan distributor yang melakukan wanprestasi secara khusus belum ada yang mengaturnya. Namun upaya yang dapat dilakukan adalah upaya hukum preventif dan upaya hukum represif. Upaya hukum preventif dilakukan dengan cara Pendokumentasian, Perjanjian, Pendaftaran Merek, Pengawasan mutu produk. Perlindungan hukum represif Secara non litigasi (negoisasi) dan litigasi dengan cara gugatan ganti rugi dan tuntutan pidana.
2. Hambatan dan upaya yang dialami oleh CV Linggar Sentosa adalah sebagai berikut :
 - a) pertama kurangnya pengetahuan tentang hukum dan tidak adanya tenaga ahli dibidang hukum menyebabkan proses pengajuan gugatan serta tuntutan terhambat. Upaya yang dilakukan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum yang ditunjuk.
 - b) kedua kurangnya pengawasan produsen yang menyebabkan pihak distributor melakukan wanprestasi, upaya yang dilakukan membuat tim

kerja untuk mengawasi proses pendistribusian produk serta pengawasan konsumen produk.

- c) ketiga besarnya biaya perkara menyebabkan produsen enggan untuk segera menindak lanjuti gugatannya. Upaya yang dilakukan menunjuk kuasa hukum yang dengan biaya relative lebih rendah.

B. Saran

Saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai penelitian ini, ditujukan kepada beberapa pihak yakni sebagai berikut :

- a) Saran yang penulis berikan bagi pemerintah
 - adalah dengan melakukan upaya-upaya yang ketat yakni membuat peraturan perundang-undangan yang mana pengaturan tersebut belum mengatur secara ketat mengenai perlindungan hukum bagi produsen.
 - serta melakukan suatu tindakan bagi penegak hukum kepada para oknum distributor wanprestasi, hal ini dilakukan sebagai suatu aksi nyata kepedulian kepada pengusaha atau pemilik dari produk yang digunakan serta memberikan sanksi kepada para pelakunya untuk menciptakan suatu hukum yang berlandaskan tujuan hukum.
- b) Saran penulis bagi pelaku usaha atau produsen
 - dengan melakukan aksi nyata yakni melakukan tindakan hukum untuk para distributor wanprestasi sesuai dengan prosedur yang ada. Hal ini dilakukan untuk membuat efek jera bagi para pelaku dikarenakan merugikan pihak-pihak yang bersangkutan.

c) Saran bagi distributor

- Seharusnya distributor tidak melakukan perbuatan yang melanggar dari perjanjian yang telah disepakati
- Demi kelancaran usahanya seharusnya distributor tetap menjaga kualitas produk yang menjadi obyek usahanya.

Distributor seharusnya tetap membaca kembali sanksi dan ketentuan yang ada dalam perjanjian dengan produsen.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirudin dan H. Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2008.

_____, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Bandung, 2005
Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Chidir Ali, **Badan Hukum**, Alumni, Bandung, 1999

Frans Hendra Winarta, **Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional**, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011

Iqbal Hasan, **Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 82

Iqbal Hasan, **Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

Ishaq, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum (cetakan ketiga)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Janus sidobalok, **Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia**. Citra Aditya. Jakarta. 2010

Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, , **Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern**, PT Refika Aditama, Bandung, 2004

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, **Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Manullang, E.Fernando , **Menggapai Hukum Berkeadilan**, Penerbit Kompas, Jakarta. 2007

Muhamad Djumhana, **Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

- Mulyana Kusumah, **Perspektif, Teori, dan Kebijakan Hukum**, Rajawali, Jakarta, 1986
- Munir Fuady, **Arbitrase Nasional (ALternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- OK Saidin, **Aspek Hukum Kekayaan Intelektual**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Philipus M. Hudjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- R Setiawan, **Pokok Pokok Hukum Perikatan**, Putra Abardin, Bandung, 1999.
- R.Subekti, **Hukum Perjanjian** Cet.ke-II, Jakarta: Pembimbing Masa, 1970,
- Rachmadi Usman, **Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia**, Alumni, Jakarta, 2003
- Rahman Syamsudin dan Ismail Aris, **Merajut Hukum Indonesia**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2005
- Ranti Fauza Mayana, **Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas**, Grasindo, Jakarta, 2004
- S. Nasution, **Metode Research**, Bumi Aksara, Jakarta, 2006
- Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum Cetakan Keenam**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, **Metodelogi Penelitian**, Mandar Maju, Bandung, 2002
- Soerjono Soekanto, 1985, **Efektifitas peranan Hukum dan Sanksi**, Bandung, Remaja Karya,
- Soerjono Soekanto, **Efektifitas peranan Hukum dan Sanksi**, Remaja Karya, Bandung, 1985
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2005.
- Sri Harini Dwiyatmi, **Pengantar Hukum Indonesia**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2007

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum suatu pengantar*, ed.ke-3 cet.ke-1. Yogyakarta.Liberty. 2007

Wirjono Prodjodikoro, **Perbuatan Melanggar Hukum, dikutip dari Abdul Rachmad Budiono, Pengantar Ilmu Hukum**, Bayumedia Publishing, Malang, 2005

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1 butir 6, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Nomor, Tambahan Lembar Negara Nomor.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Nomor, Tambahan Lembar Negara Nomor.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

JURNAL

Arini Faradinna.jurnal. **Perbandingan Kegiatan Sewa Guna Usaha Dan Pembiayaan Konsumen(Analisis Contoh Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Di Pt.Bca Finance Dikaitkan Dengan Pengaturan Mengenai Jaminan Fidusia)**, skripsi, fakultas hukum universitas Indonesia, Jakarta 2013

- Muryati, Dewi Tuti dan B. Rini Heryanti, **Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan**, Jurnal Dinamika Sosial Budaya Nomor 1, 2011
- Setiono, **Rule of Law (Supremasi Hukum)**. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004

INTERNET

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, <http://www.dgip.go.id/>.
<http://repository.uin-suska.ac.id/6749/4/BAB%20III.pdf> diakses tanggal 21 oktober 2018 pukul 9.52.
- <http://tesishukum.com>, diakses pada tanggal 2 Mei 2018 pukul 10.00 WIB
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/>.
- Hasil wawancara dengan pemilik Merek CR1 Bapak Choiri, Pada tanggal senin 09 April 2018 di Kabupaten Gresik